BAB IV

Analisis Status Perempuan Bangsa DPW PKB Jawa Timur Dalam Prespektif Fiqh Siyasah

A. Status Perempuan Bangsa DPW PKB Jawa Timur

Dari uraian di atas pada bab III dapat di ambil analisa bahwa perempuan di DPW PKB jawa Timur memliki beberapa peran yang dilakukan. Melihat dari jumlah kader perempuanya yang mewakili di Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur sebesar 7 kader perempuan dari DPW PKB Jawa Timur. Terpilihnya perempuan menjadi anggota DPRD Jawa Timur berlatar belakang kader Perempuan DPW PKB Jawa Timur, menunjukkan bahwa secara kultural, posisi politik perempuan menunjukkan perkembangan signifikan. Perempuan DPW PKB Jawa Timur ternyata mampu menjadi anggota dewan dengan jumlah yang tidak sedikit, sebuah prestasi yang pantas diapresiasi. Hal ini merupakan sebuah nilai plus atas keterbukaan masyarakat Jawa Timur dalam proses kesetaraan gender, baik di bidang politik maupun yang lainnya.

Bahkan jika di lihat prosentase keterwakilan kaum rakyat di kursi anggota dewan, terutama di Jawa Timur, menunjukkan perkembangan wacana kesetaraan gender yang mulai diterima masyarakat. Melihat dari jumlah yang sangat besar tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa peran-peran perempuan PKB Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap DPW PKB Jawa Timur. Peran yang mereka lakukan banyak hal diantaranya ketika menjelang setiap pemilihan umum yang ada di jawa timur mereka melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsolidasi kepada seluruh elemen kader perempuan yang ada sampai ke titik paling bawah sampai ke desa-desa dengan cara yang dilakukan mereka membentuk kader penggerak partai (KPP), peran yang dilakukan ini agar calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon wali kota (cawali) yang diusung PKB dalam pilkada mendatang memperoleh dukungan rakyat setempat. Menurut Anisah[1], jumlah suara pemilih perempuan lebih besar daripada laki-laki. Di Provinsi Jatim tercatat ada 8.505 desa yang jika setiap desa memiliki minimal lima orang pengurus KPP, maka minimal sudah ada 42.525 kader votegater. Hal itu akan bekembang lebih besar dan berlipat ganda, karena setiap kader minimal memiliki anggota keluarga dan sanak famili. Dengan peran yang dilakukan oleh kader perempuan itu guna untuk meraup suara yang besar agar mendapatkan kemenangan dari kader PKB tersebut.

Selain peran tersebut Kader Perempuan DPW PKB Jawa Timur juga melakukan kegiatan social pada hari Kartini dengan model kegiatan mengunjungi Ibu-ibu yang melahirkan pada hari tersebut di rumah-rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Kegiatan ini dimaksudkan bahwa kader perempuan DPW PKB Jawa Timur sangat merasa prihatin dengan masih banyaknya ibu-ibu di Jatim yang melahirkan bayinya secara prematur. Sebab kelahiran prematur sangat beresiko besar menghilangkan nyawa baik untuk ibu maupun bayinya. Ke depan, pihaknya akan terus aktif melakukan

[1] Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur dan Juga salah satu DPRD Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi dan mengusulkan program kepada pemerintah agar bisa menekan angka kematian ibu dan bayi.

Selain itu juga Perempuan PKB Jawa Timur juga membela terhadap kaum yang tertindas dengan bentuk dukungan, mendukung Peraturan Pemerintah (Perppu) soal hukuman kebiri bagi penjahat seksual. Karena pada dekade akhir ini sangat marak terhadap pelecehan seksual yang ada, hampir diseluruh kawasan yang ada di Republik Indonesia telah terjadi pelecehan social, maka dari itu kader perempuan DPW PKB Jawa Timur mendukung penuh perubahan Perppu Ke Undang-undang tentang Hukuman Kebiri bagi kejatan Seksual.

Selanjutnya peran yang dilakukan Kader Perempuan DPW PKB Jawa Timur, berupaya untuk menseriusi dalam penanganan kasus kekerasan terhdapan perempuan dan anak, karena seperti diketahui selama dua tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat dan semakin marak. Pada tahun 2012 sebanyak 357 kasus, dan tahun 2013 ditemukan sebanyak 399 kasus. Itu artinya telah terjadi peningkatan sebanyak 42 kasus. Ungkap Dra.Hj.Anisah Syakur,M.Ag.[2]

[2] *Wawancara,* Dra.Hj.Anisah Syakur,M.Ag. pada tanggal 27 juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Status Politik Perempuan Bangsa di PKB Jawa Timur.

Dari Apa yang telahdipaparkan dari beberapa catatan terhadap beberapa argumentasi mereka yang berkata bahwa Islam tidak memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dengan hadist

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّه بِكَلِمَةٍ سمعتها من رسول لله صلي الله عليه وسلم أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اهل فَارِس قد مَلَّكُوا عليهم بنت كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakroh mengatakan : Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita. " (HR. Al Bukhori).

Hadits ini dari segi riwayah tidak seorangpun pakar Hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi diroyah,dalalah hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan Negara. Latar belakang turunnya hadits ini memang ditujukan kepada masyarakat Persi yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang wanita. Akan tetapi, walaupun hadits ini merupakan komentar atas suatu ke jadian pengangkatan wanita menjadi raja, namun kata “qaumun” (isim jins dalam bentuk nakirah) ini memberikan makna umum (’aam). Artinya kata qoum diatas berlaku untuk semua kaum, termasuk kaum muslim di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya. Dalam redaksi hadits itu, Rasul tidak melafadzkan dengan kata, lan yu fliha qaum al-faaris (tidak beruntung masyarakat Persia), akan tetapi menggunakan kata-kata umum, yakni "qaumun"

Beberapa hal yang mempengaruhi belum terwujudnya keserasian jender antara lain, masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang patriarkis. Nilai-nilai ini yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini di tandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Di samping itu, ketidaktepatan pemahaman ajaran agama seringkali menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.[3]

Islam sebagai agama samawi terakhir, di yakini sebagai agama yang universal tidak terbatas waktu dan tempat. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta. Di sisi lain, ajaran islam di yakini sebagai risalah yang sempurna dan dapat di gunakan sebagai pedoman umat manusia.[4] Keadilan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan perlu di ciptakan dengan menciptakan dan mempertegas penafsiran-penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan zamanya atau konteksnya. Kerangka pemikiran ini tidak

[3]Khofifah Indar Parawansah. Mengukir Paradigma Menembus Tradisi. h. 23
[4]Ajaran agama Islam mencakup tiga hal yakni akidah, syari'at dan akhlak.Pembagian tersebut di dasarkan atas sabda Nabi Muhammad SAW, tentang Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahi tujuan atau maksud Tuhan menurunkan syari'at kepada manusia yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Ketika bicara politik, mau tidak mau kita harus berbicara insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan sekaligus obyek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kitab-kitab fiqh politik, namun dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan dalam kajian fiqh politik. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.[5]Oleh karena itu kedudukan perempuan dalam fiqh politik ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik ada tiga pendapat yang berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini.

Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan

[5]Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan DalamIslam, hlm.189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan dari kelompok Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-dalil al-Qur'an tentang konsep 'adālah (keadilan) dan musawah (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam dan juga sebagai organisasi Islam terbesar di indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) yang selalu menghiasi wacana publik Indonesia,selain itu juga menjadi inspirasi bagi gerakan dan pemikiran keislaman yang berwawasan kebangsaan, respon terhadap perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU selalu memposisikan diri sebagai jangkar nusantara, terutama yang digalang oleh kader-kader mudanya.

Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah di persentuhkan dengan pengetahuan baru dari berbagai khazanah modern.Mereka tidak hanya peduli dengan modernitas yang terus di kritik dan disikapi secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.[6]

Dalam konteks ini, NU menjadikan kepercayaan teologis sebagai basis pengembangan masyarakat dengan mengusung isu-isu universal seperti, HAM, demokrasi, civil society termasuk juga kesetaraan gender. Pembagian kerja antara sektor publik dengan domestik adalah pilihan masing-masing individu perempuan dan ini patut di hargai.Kaum feminis

[6]http://www.gp-ansor.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kancah yang lebih luas dimana perempuan di beri kebebasan dalam memilih dan tidak ada paksaan sebagai ibu rumah tanggah saja. Ia juga memerlukan kehidupan lain di luar yang dapat dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Oleh karena itu, pilihan perempuan kemasalah kemasyarakatan dan kenegaraan tidak dapat di abaikan begitu saja.

Agama adalah nasehat bagi laki-laki dan perempuan secara umum dan apa yang lebih dari sekedar nasihat, berupa tugas pengawasan atas para pejabat yang pengawasan itu merupakan satu cabang dari Amar Ma'ruf NahiMunkar juga.[7]Dua tugas berupa pembuatan perundang-undangan dan pengawasan atas wewenang eksekutif, merupakan tugas "umat khusus" yang di wajibkan oleh Allah atas umat umum baik laki-laki maupun perempuan untuk membentuknya.

Allah SWTberfirman:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar" (QS. Ali imrān: 104).[8]

Selain itu, secara eksplisit disebutkan bahwa. Dalam konteks peran publik menurut prinsip Islam, perempuan di perbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekwensi bahwa ia dapat di pandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.

[7]Farid Abdul Khaliq,. Fikih Politik Islam, hal. 129
[8]Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem Negara bangsa telah terbuka lebar, terutama peranya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id